
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT, APBD, DAN IPM DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI PAPUA BARAT TAHUN 2020-2024

Nabila Habibatur Rohma¹, Syakinah Azzahra²

Institut Agama Islam Negeri, Papua Barat, Indonesia¹

Institut Agama Islam Negeri, Papua Barat, Indonesia²

E-mail: habibahnaha@gmail.com¹ syakinahaz@gmail.com²

Abstract:

Poverty remains one of the major challenges in the economic development of West Papua Province. The high poverty rate is influenced by various factors, including limited infrastructure, low human resource quality, and restricted access to education and healthcare services. This study aims to analyze the effect of zakat management, Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) spending, and the Human Development Index (HDI) on poverty levels in West Papua during the 2020–2024 period. This research employs a quantitative approach using secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS), the National Amil Zakat Agency (BAZNAS), and West Papua APBD realization reports. The data were analyzed using multiple linear regression with the assistance of EViews software. The results indicate that zakat management, APBD spending, and HDI do not have a statistically significant partial effect on poverty levels. Simultaneously, these variables also show no significant effect on poverty reduction in West Papua. These findings suggest that poverty is influenced not only by zakat management, government spending, and human development, but also by other factors such as economic growth, unemployment, inflation, geographical conditions, and development inequality. Therefore, stronger synergy between local governments and zakat management institutions is needed to support sustainable poverty alleviation efforts.

Keywords: “Zakat Management; Regional Budget Expenditure; Human Development Index; Poverty; West Papua”

Abstrak:

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan utama pembangunan ekonomi di Provinsi Papua Barat. Tingginya tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengelolaan zakat, pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat periode 2020–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan laporan realisasi APBD Provinsi Papua Barat. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak EViews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pengelolaan zakat, pembelanjaan APBD, dan IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil uji simultan juga menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Papua Barat. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh zakat, APBD, dan IPM, tetapi juga oleh faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, kondisi geografis, dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih optimal antara pemerintah daerah dan lembaga pengelola zakat untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: “Pengelolaan Zakat ; APBD ; IPM ; Kemiskinan ; Papua Barat”

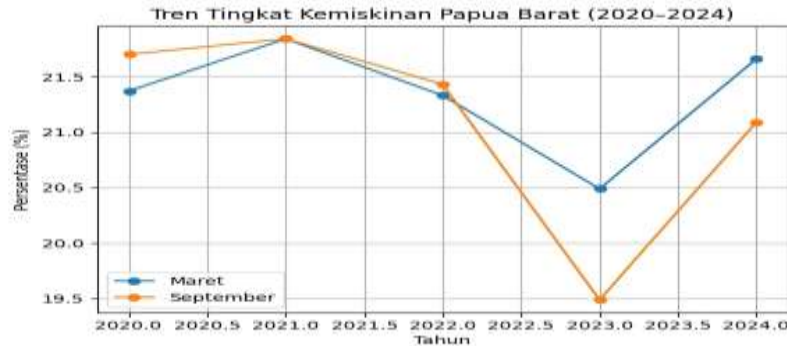
PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Papua Barat. Tingginya tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Papua Barat termasuk salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, dengan persentase penduduk miskin mencapai 21,51 persen. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya optimalisasi berbagai instrumen ekonomi, baik yang bersifat sosial maupun fiskal, untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Papua Barat (Parinusa and Waimbo 2020). Data Badan Pusat Statistik BPS (2020-2024) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Papua Barat selama periode 2020–2024 mengalami fluktuasi serta terdapat kesenjangan yang cukup besar antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk menekan angka kemiskinan, termasuk melalui optimalisasi pengelolaan zakat dan pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berikut adalah data mengenai persentase penduduk miskin Papua Barat dari pedesaan dan perkotaan:

Tabel 1. Tabel mengenai persentase penduduk miskin di provinsi Papua Barat: 2020-2024

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN PAPUA BARAT						
	Pedesaan		Perkotaan		Jumlah	
1.	2020					
	Sem 1 (Mar)	Sem 2 (Sep)	Sem 1 (Mar)	Sem 2 (Sep)	Sem 1 (Mar)	Sem 2 (Sep)
	32,70%	33,20%	5,85%	6,31%	21,37%	21,70%
	Pedesaan		Perkotaan		Jumlah	
2.	2021					
	Sem 1 (Mar)	Sem 2 (Sep)	Sem 1 (Mar)	Sem 2 (Sep)	Sem 1 (Mar)	Sem 2 (Sep)
	33,40%	33,50%	6,50%	6,44%	21,84%	21,84%
	Pedesaan		Perkotaan		Jumlah	
3.	2022					
	Sem 1 (Mar)	Sem 2 (Sep)	Sem 1 (Mar)	Sem 2 (Sep)	Sem 1 (Mar)	Sem 2 (Sep)
	31,42%	32,12%	6,96%	7,64%	21,33%	21,43%
	Pedesaan		Perkotaan		Jumlah	
4.	2023					
	Sem 1 (Mar)	Sem 2 (Sep)	Sem 1 (Mar)	Sem 2 (Sep)	Sem 1 (Mar)	Sem 2 (Sep)
	29,20%	28,50%	8,23%	7,43%	20,49%	19,49%
	Pedesaan		Perkotaan		Jumlah	
5.	2024					
	Sem 1 (Mar)	Sem 2 (Sep)	Sem 1 (Mar)	Sem 2 (Sep)	Sem 1 (Mar)	Sem 2 (Sep)
	27,68%	26,34%	8,17%	9,50%	21,66%	21,09%
	Pedesaan		Perkotaan		Jumlah	

Berdasarkan data persentase penduduk miskin di Provinsi Papua Barat periode 2020–2024, terlihat adanya kesenjangan yang cukup besar antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Pada Maret 2020, tingkat kemiskinan di pedesaan mencapai 32,70% dan meningkat menjadi 33,20% pada September 2020, sedangkan di perkotaan hanya sebesar 5,85% dan 6,31%. Pada tahun-tahun berikutnya, kemiskinan pedesaan cenderung menurun hingga mencapai 26,34% pada September 2024. Sebaliknya, tingkat kemiskinan perkotaan mengalami fluktuasi dan meningkat menjadi 9,50% pada September 2024. Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan Papua Barat masih berada pada kisaran 19,49%–21,84% selama periode penelitian. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Papua Barat masih tergolong tinggi, terutama karena besarnya kontribusi kemiskinan di wilayah pedesaan sehingga penurunan kemiskinan secara keseluruhan belum berlangsung secara konsisten.



Gambar 1. Grafik Tingkat Kemiskinan Di Papua Barat : 2020-2024

Pergerakan tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat periode 2020–2024, sebagaimana divisualisasikan dalam grafik, menunjukkan pola yang berubah-ubah dan belum stabil. Pada awal periode (2020–2021), tingkat kemiskinan cenderung stagnan di sekitar 21 persen. Periode 2022 hingga 2023 memperlihatkan tren penurunan yang cukup berarti, mengindikasikan adanya perbaikan dalam kondisi ekonomi masyarakat. Namun, tren positif ini tidak berlanjut secara konsisten, terbukti dengan adanya peningkatan kembali pada tahun 2024, meskipun diikuti sedikit penurunan di periode selanjutnya. Pola fluktuatif ini menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di Papua Barat masih menghadapi tantangan substansial, sehingga capaian yang diraih belum menunjukkan stabilitas dan keberlanjutan.

Selain faktor ekonomi dan kebijakan fiskal, tingkat kemiskinan juga dipengaruhi oleh kualitas pembangunan manusia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mencerminkan capaian pembangunan manusia berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak (BPS, 2024). Penelitian Ana Putri (2022) menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, sehingga peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat dapat membantu menurunkan tingkat kemiskinan. Namun, Papua Barat masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses pendidikan, fasilitas kesehatan, infrastruktur dasar, serta kondisi geografis yang sulit dijangkau. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya kualitas pembangunan manusia dan tingginya tingkat kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS), perkembangan IPM provinsi Papua Barat periode 2020–2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. (Persentase Indeks Pertumbuhan Manusia di Papua Barat, Periode 2020–2024. [BPS])

PERSENTASE INDEKS PERTUMBUHAN MANUSIA DI PAPUA BARAT	
Tahun	IPM Papua Barat
2020	65,94%
2021	66,11%
2022	66,03%
2023	66,84%
2024	67,69%

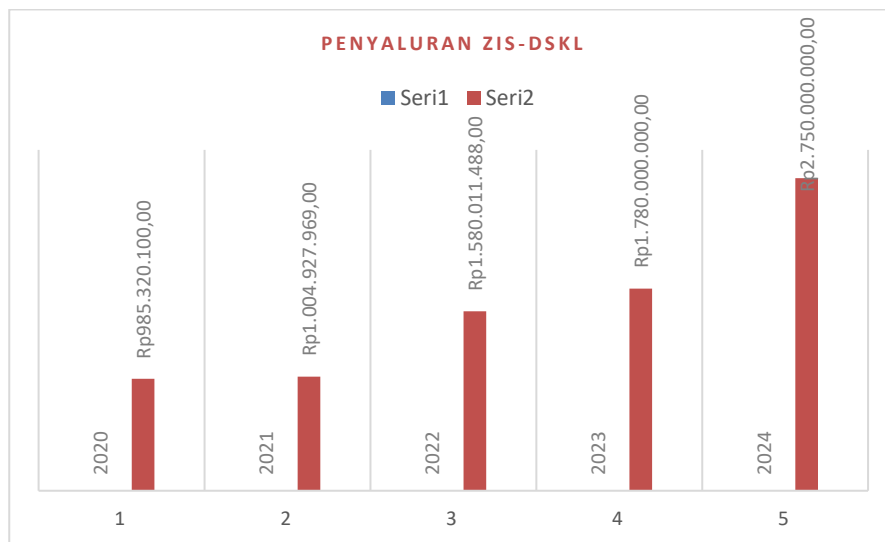
Berdasarkan data BPS, IPM Papua Barat menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020–2024. Nilai IPM meningkat dari 65,94 pada tahun 2020 menjadi 67,69 pada tahun 2024, meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Namun, pemerataan pembangunan manusia masih menjadi tantangan, terutama di daerah terpencil yang masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat merupakan instrumen sosial-ekonomi yang berperan dalam mengurangi kemiskinan melalui redistribusi kekayaan dari masyarakat mampu kepada kelompok yang membutuhkan. Selain membantu memenuhi kebutuhan dasar, zakat produktif juga dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik melalui pemberian modal usaha dan program pemberdayaan. Namun, optimalisasi pengelolaan zakat di Papua Barat masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan penghimpunan dana, serta kondisi demografis masyarakat yang mayoritas non-Muslim (Imran 2025).

Optimalisasi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan sangat bergantung pada peran lembaga pengelola zakat. Lembaga yang memiliki struktur resmi berfungsi menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat secara efektif, transparan, dan tepat sasaran kepada mustahik. Selain itu, kelembagaan yang kuat dan terpercaya juga berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui jalur formal.

Tabel 3. (Tabel Jumlah Institusi Zakat : Baznas 2020-2024)

JUMLAH INSTITUSI ZAKAT (RESMI)			
Tahun	BAZNAS Provinsi	BAZNAS Kab/Kota	Total
2020	1	13	14
2021	1	13	14
2022	1	13	14
2023	1	13	14
2024	1	13	14

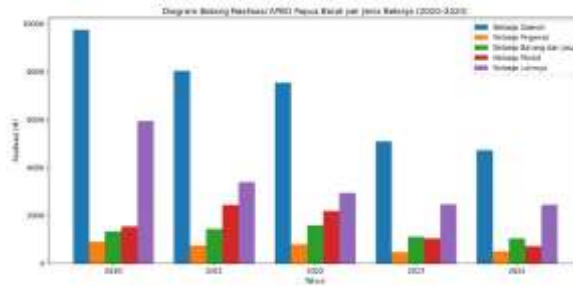
Keberadaan lembaga pengelola zakat yang resmi merupakan faktor penting dalam mendukung efektivitas penghimpunan dan pendistribusian dana zakat. Berdasarkan data tahun 2020–2024, Papua Barat memiliki 1 BAZNAS tingkat provinsi dan 13 BAZNAS tingkat kabupaten/kota, sehingga total terdapat 14 institusi yang jumlahnya relatif stabil setiap tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa infrastruktur kelembagaan zakat telah tersedia. Namun, efektivitas pengelolaan zakat tidak hanya ditentukan oleh jumlah lembaga, melainkan juga oleh kinerja, efektivitas program, serta partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat. Tantangan utama yang dihadapi adalah meningkatkan penghimpunan dan penyaluran zakat agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.



Gambar 2. (Visualisasi Penyaluran ZIS-DSKL, BAZNAS: 2020-2024)

Dalam penelitian ini, data penyaluran ZIS-DSKL disajikan dalam bentuk total penyaluran per tahun karena keterbatasan ketersediaan data rinci yang konsisten, terutama pada tahun 2023–2024. Penyajian data agregat ini bertujuan menjaga kesinambungan analisis selama periode penelitian. Meskipun demikian, secara konseptual penyaluran ZIS-DSKL mencakup bidang kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan dakwah. Bidang-bidang tersebut menunjukkan bahwa distribusi zakat tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan jangka panjang. Dengan demikian, pemahaman terhadap struktur penyaluran tetap penting dalam menginterpretasikan hasil penelitian.

Dalam pembangunan daerah, zakat dan APBD merupakan instrumen yang dapat saling melengkapi dalam upaya pengentasan kemiskinan. Data realisasi APBD Provinsi Papua Barat periode 2020–2024 menunjukkan adanya fluktuasi pada alokasi dan realisasi anggaran dari tahun ke tahun. Perubahan tersebut mencerminkan pergeseran prioritas pembangunan dan kapasitas fiskal daerah. Beberapa pos belanja yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, seperti bantuan sosial, hibah, dan belanja tidak terduga, juga mengalami perubahan yang cukup signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas intervensi pemerintah dalam mengatasi kemiskinan masih dipengaruhi oleh stabilitas dan kemampuan fiskal daerah. (Risdiyanto, Mollet, and Hutajulu 2023) Fluktuasi realisasi belanja APBD menunjukkan bahwa efektivitas APBD sebagai instrumen pembangunan dan pengentasan kemiskinan masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama saat terjadi tekanan fiskal atau perubahan prioritas anggaran. Ketidakstabilan belanja pada sektor-sektor strategis berpotensi mengurangi efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara kebijakan fiskal daerah dan instrumen ekonomi syariah seperti zakat agar upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.



Gambar 3. (Diagram Batang Perbelanjaan APBD: Portal APBD Periode Akhir “Desember”)

Diagram batang pada Gambar 3 menunjukkan perbandingan realisasi belanja APBD Provinsi Papua Barat berdasarkan jenis belanja selama periode 2020–2024. Diagram tersebut memperlihatkan adanya kenaikan, penurunan, dan fluktuasi pada berbagai jenis belanja, sehingga memudahkan pemahaman terhadap perubahan prioritas anggaran pemerintah daerah dari tahun ke tahun. Penurunan realisasi APBD dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti penyesuaian transfer dana dari pemerintah pusat, kebijakan efisiensi anggaran, perubahan prioritas pembangunan pascapandemi COVID-19, serta keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat masih dipengaruhi oleh dinamika keuangan daerah. (Kuntadi and Rosdiana 2022)

Penurunan realisasi APBD dapat memengaruhi efektivitas upaya pengentasan kemiskinan karena berpotensi mengurangi dukungan terhadap program strategis, seperti bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Di Papua Barat, tren penurunan belanja daerah dapat membatasi intervensi pemerintah dalam menekan angka kemiskinan. Namun, penurunan anggaran tidak selalu berdampak negatif apabila disertai efisiensi dan pengelolaan yang lebih tepat sasaran. Sebaliknya, jika terjadi pada sektor-sektor penting, kondisi tersebut dapat menghambat pembangunan dan memperlambat penurunan kemiskinan. (Kende 2024)

Hubungan antara pengelolaan zakat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Papua Barat memiliki keterkaitan yang erat dan saling menguatkan satu sama lain. Pengelolaan zakat melalui program zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai bantuan bersifat sementara. Sementara APBD memiliki peran strategis dalam mendanai berbagai kegiatan pembangunan daerah, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar, yang keseluruhannya di tuju untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas Pembangunan manusia sebagaimana tercermin dalam nilai IPM juga menjadi faktor penentu yang sangat penting, mengingat hal ini berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan yang layak, memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, serta mencapai taraf hidup yang pantas. Mengingat kondisi Provinsi Papua Barat yang masih dihadapkan pada beragam tantangan pembangunan, sinergi yang baik antara pengelolaan zakat, pemanfaatan APBD, dan upaya peningkatan IPM diharapkan dapat mewujudkan strategi pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan berjangka panjang.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara spesifik menelaah peran zakat dalam konteks mitigasi risiko ekonomi di Provinsi Papua Barat. Analisis ini diperkaya dengan mengaitkannya secara langsung dengan dinamika kebijakan fiskal daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta kualitas pembangunan manusia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pendekatan ini menjadi penting karena fluktuasi realisasi APBD serta rendahnya kualitas pembangunan manusia di beberapa wilayah Papua Barat masih menjadi tantangan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga didukung oleh penggunaan data empiris yang mutakhir selama periode 2020-2024, meliputi data institusi zakat resmi, realisasi pembelanjaan APBD, dan perkembangan IPM Papua Barat, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih kontekstual mengenai kondisi sosial ekonomi daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengelolaan zakat, pembelanjaan APBD, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Papua Barat. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji sinergi antara instrumen ekonomi Islam, kebijakan fiskal daerah, dan pembangunan manusia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini turut mengidentifikasi berbagai tantangan dalam optimalisasi pengelolaan zakat, efektivitas pembelanjaan APBD, serta peningkatan kualitas pembangunan manusia guna mendukung pembangunan ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan studi ekonomi Islam dan pembangunan daerah, khususnya mengenai peran zakat, APBD, dan IPM dalam pengentasan kemiskinan. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai integrasi instrumen sosial keagamaan, kebijakan fiskal daerah, dan pembangunan manusia dalam konteks Papua Barat yang masih jarang diteliti. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, lembaga pengelola zakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi pengelolaan yang lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran. Penelitian ini juga diharapkan mampu mendorong peningkatan sinergi antara sektor publik dan lembaga keagamaan dalam membangun sistem pengentasan kemiskinan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Papua Barat.

Uraian sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan zakat memiliki potensi besar dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan mengurangi risiko ekonomi di Provinsi Papua Barat. Namun, optimalisasi potensi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kelembagaan, rendahnya literasi masyarakat, efektivitas pengelolaan, serta kualitas pembangunan manusia yang belum merata. Kebijakan fiskal daerah melalui APBD juga masih menghadapi keterbatasan dalam menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat secara optimal. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pengembangan pendekatan yang lebih terintegrasi melalui sinergi antara pengelolaan zakat, pembelanjaan APBD, dan peningkatan Indeks Pembangunan

Manusia (IPM). Dalam penelitian ini, IPM digunakan sebagai variabel yang mencerminkan kualitas pembangunan manusia melalui aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak yang turut memengaruhi tingkat kemiskinan masyarakat.

LANDASAN TEORI

1. Landasan Teori mengenai Zakat

1.1 Konsep Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam kerangka ekonomi Islam, zakat merupakan pilar utama dan instrumen kunci redistribusi kekayaan. Yusuf al-Qaradawi (1999) menjelaskan bahwa zakat tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan dasar penerima, tetapi juga berpotensi dikembangkan secara produktif guna mewujudkan kemandirian ekonomi. Dalam penelitian ini, pengelolaan zakat yang optimal menjadi faktor krusial, karena penyaluran yang terarah—baik dalam bentuk bantuan maupun pemberdayaan—dapat menurunkan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. (Daulay, R. J., Khoiri N. 2022)

1.2 Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam

Dalam perspektif Islam, keadilan distributif menjadi prinsip dasar penyaluran kekayaan secara adil dan merata, mengingat harta merupakan amanah Allah SWT untuk kesejahteraan bersama. Zakat berperan sebagai instrumen utama redistribusi kekayaan dari kelompok mampu kepada yang membutuhkan guna menekan ketimpangan dan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan pandangan Yusuf al-Qaradawi, yang menegaskan zakat bukan sekadar bantuan sosial, melainkan sarana pemberdayaan ekonomi untuk memperkuat keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan. (Pane et al. 2025)

2. Landasan Teori Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.1 Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam keuangan publik, APBD merupakan instrumen fiskal utama pemerintah daerah yang memiliki tiga fungsi mendasar: alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi ditujukan untuk penyediaan barang dan jasa publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Melalui fungsi distribusi, APBD berperan dalam pemerataan pendapatan dan pengurangan kesenjangan sosial, sedangkan fungsi stabilisasi bertujuan menjaga keseimbangan ekonomi daerah. Pengelolaan APBD yang efektif menjadi kunci mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Dalam penelitian ini, pembelanjaan APBD dipandang sebagai instrumen fiskal yang berperan menurunkan kemiskinan melalui alokasi belanja yang berpihak pada masyarakat miskin. (Kasman 2017)

2.2 Peran Belanja Publik dalam Kesejahteraan Masyarakat

Belanja publik berperan strategis meningkatkan kualitas hidup melalui penyediaan layanan dasar dan infrastruktur. Alokasi anggaran pada pendidikan dan kesehatan berimplikasi langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas, dan pendapatan masyarakat. Selain itu, pembangunan infrastruktur memperluas akses ekonomi serta mendukung kelancaran kegiatan produksi dan distribusi. Secara teoritis, pengelolaan belanja publik yang efektif menjadi kunci pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, belanja publik berfungsi sebagai instrumen pembangunan sekaligus pendorong utama peningkatan kualitas hidup dan pemerataan ekonomi. (Amrin 2024)

3. Landasan Teori Indeks Pembangunan Manusia

3.1 Teori Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang berfungsi mengukur tingkat capaian pembangunan manusia berdasarkan tiga dimensi pokok, meliputi bidang kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Sesuai pandangan United Nations Development Programme (UNDP), hakikat pembangunan manusia dipahami sebagai proses perluasan beragam pilihan bagi masyarakat agar dapat menjalani kehidupan yang sehat, mengakses pendidikan yang berkualitas, serta menikmati taraf hidup yang layak dan sejahtera. Hal ini menunjukkan IPM tidak hanya berperan sebagai indikator penting untuk menilai keberhasilan pembangunan di suatu wilayah, tetapi juga berfungsi sebagai dasar utama dalam penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan publik yang berorientasi langsung pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. (UNDP, 2020)

3.2 Teori Pendukung Indeks Pembangunan Manusia

Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*) yang dikemukakan oleh Theodore Schultz dan Gary Becker menegaskan bahwa aspek pendidikan, kesehatan, dan pengembangan keterampilan tidak sekadar dianggap sebagai kebutuhan dasar, melainkan merupakan bentuk investasi strategis. Investasi tersebut berperan penting dalam meningkatkan kualitas, produktivitas, serta kemampuan setiap individu untuk menghasilkan pendapatan yang lebih layak. Dalam kerangka pembangunan wilayah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dipandang sebagai indikator utama yang secara langsung mencerminkan tingkat kualitas modal manusia, mengingat indeks ini disusun berdasarkan tiga dimensi pokok, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan nilai IPM menunjukkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, yang pada akhirnya akan berdampak positif dalam mendorong pertumbuhan produktivitas, memperluas akses dan kesempatan kerja, meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, serta menjadi pendorong utama dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan. (Siahaan and Sriwijaya 2014)

4. Landasan Teori Kemiskinan

4.1 Teori Pembangunan dan Kemiskinan

Teori pembangunan memandang kemiskinan sebagai dampak langsung dari rendahnya pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh investasi, modal, infrastruktur, dan teknologi berpotensi meningkatkan produktivitas serta pendapatan masyarakat. Namun, pertumbuhan tersebut belum tentu mengurangi kemiskinan jika tidak bersifat inklusif, sebab manfaat yang tidak terdistribusi secara adil akan tetap memicu ketimpangan. (Maulani 2023)

4.2 Teori Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan pembangunan antarwilayah merupakan fenomena alami dalam proses ekonomi. Menurut teori Douglas C. North, wilayah dengan infrastruktur dan konsentrasi ekonomi yang lebih baik tumbuh lebih cepat berkat efisiensi biaya dan inovasi, sedangkan wilayah terbelakang terhambat oleh keterbatasan akses dan sumber daya. Demikian pula pandangan Kuznets, yang menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan cenderung meningkat pada tahap awal pembangunan, namun akan menurun seiring kematangan ekonomi. Oleh karena itu, kesenjangan tersebut merupakan dampak struktur ekonomi, sehingga diperlukan kebijakan yang tepat guna pemeratakan pembangunan dan memastikan keadilan antarwilayah. (Syarifudin et al. 2024)

Berdasarkan landasan teori, pengelolaan zakat, pembelanjaan APBD, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan faktor penentu dalam pengurangan kemiskinan. Zakat berperan sebagai instrumen pemerataan dalam ekonomi Islam, APBD sebagai kebijakan fiskal daerah untuk kesejahteraan, dan IPM sebagai cerminan kualitas sumber daya manusia. Ketiga variabel ini saling mendukung dalam upaya menekan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh ketiganya terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat pada periode 2020–2024.

PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu menjadi landasan penting dalam penelitian ini karena memberikan gambaran mengenai hubungan zakat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan kemiskinan. Azizah, Amri, and Riyaldi (2023) menemukan bahwa zakat berperan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat yang efektif dalam menurunkan kemiskinan. Temuan tersebut diperkuat oleh Imran (2025), yang menjelaskan bahwa zakat produktif melalui modal usaha dan program pemberdayaan mampu meningkatkan pendapatan serta kemandirian ekonomi mustahik.

Selain zakat, kebijakan fiskal daerah juga berperan dalam pengentasan kemiskinan. Setianda et al. (2025) menunjukkan bahwa alokasi APBD pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menekan tingkat kemiskinan. Sementara itu, penelitian Jimea et al. (2025) membuktikan bahwa peningkatan IPM melalui perbaikan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan.

Di sisi lain, kemiskinan di Papua Barat masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta kondisi geografis yang sulit dijangkau. Salim, Khoirudin, and Dahlan (2025) menjelaskan bahwa ketimpangan pembangunan antarwilayah turut memperburuk kondisi tersebut. Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, zakat, APBD, dan IPM memiliki keterkaitan dengan kemiskinan. Namun, penelitian yang mengintegrasikan ketiga variabel tersebut dalam satu model analisis, khususnya di Provinsi Papua Barat, masih sangat terbatas sehingga menjadi celah yang ingin diisi oleh penelitian ini.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengelolaan zakat, pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat. Zakat berfungsi sebagai instrumen keuangan sosial dalam Islam guna mendistribusikan kekayaan secara adil kepada kelompok yang membutuhkan. Sementara itu, APBD merupakan kebijakan fiskal daerah yang dialokasikan untuk mendorong pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program prioritas. Di sisi lain, IPM menjadi indikator kualitas sumber daya manusia yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, yang memiliki keterkaitan langsung dengan kondisi kemiskinan. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini menguji pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap tingkat kemiskinan, sehingga diajukan hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Pengelolaan zakat berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Papua Barat.
H2 : Pembelanjaan APBD berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Papua Barat.
H3 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Papua Barat.

H4 : Pengelolaan zakat, pembelanjaan APBD, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Papua Barat.

1. Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Kemiskinan

Zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan. Menurut Chaerunnisa, Muchlis, dan Eliza (2025) zakat bukan sekadar ibadah, melainkan mekanisme sosial yang memperkuat keadilan dan solidaritas. Sebagai sarana pemerataan kekayaan, zakat berfungsi mengurangi kesenjangan dan kemiskinan. Pengelolaan yang efektif dan tepat sasaran memungkinkan dana zakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar serta memberdayakan ekonomi masyarakat miskin. Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang optimal diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: H1: Pengelolaan zakat berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Papua Barat.

2. Pengaruh Pembelanjaan APBD Terhadap Kemiskinan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama keuangan daerah untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan. Melalui kebijakan fiskal ini, pemerintah mengalokasikan dana bagi sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial guna memperluas akses layanan serta mendorong aktivitas ekonomi. Risdiyanto, Mollet, dan Hutajulu (2023), menemukan bahwa peningkatan belanja daerah berhubungan negatif dengan kemiskinan, di mana alokasi yang memadai berpotensi menurunkan jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: H2: Pembelanjaan APBD berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Papua Barat.

3. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator kualitas pembangunan manusia yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Berdasarkan teori modal manusia, peningkatan kualitas sumber daya manusia akan mendorong produktivitas dan kemampuan memperoleh pendapatan. Jimea et al. (2025) membuktikan bahwa IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia; semakin tinggi nilainya, semakin besar peluang masyarakat mengakses pendidikan dan pekerjaan layak, sehingga kesejahteraan meningkat dan kemiskinan menurun. Oleh karena itu, peningkatan IPM diharapkan dapat berkontribusi nyata dalam pengurangan kemiskinan di Papua Barat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: H3: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Papua Barat.

4. Pengaruh Pengelolaan Zakat, Pembelanjaan APBD, IPM Terhadap Kemiskinan

Zakat, APBD, dan IPM merupakan faktor yang saling berkaitan dengan tingkat kemiskinan. Zakat berfungsi sebagai instrumen pemerataan pendapatan, APBD sebagai kebijakan fiskal daerah untuk kesejahteraan, dan IPM sebagai cerminan kualitas sumber daya manusia yang memengaruhi produktivitas dan taraf hidup. Sinergi ketiganya diharapkan menjadikan pengentasan kemiskinan lebih efektif. Oleh sebab itu, ketiga variabel tersebut diduga memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Papua Barat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: H4: Pengelolaan zakat, pembelanjaan APBD, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Papua Barat.

KERANGKA KONSEPTUAL

1. Pengelolaan Zakat (Variabel X1)

Pengelolaan zakat merupakan proses perencanaan, pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat kepada mustahik sesuai prinsip syariah. Dalam penelitian ini, zakat dipandang sebagai instrumen redistribusi pendapatan yang berpotensi mengurangi tingkat kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Utami, Sunarko, and Wati 2024)

2. Pembelanjaan APBD (Variabel X2)

Pembelanjaan APBD merupakan instrumen kebijakan fiskal daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyediaan layanan publik. Alokasi belanja yang tepat sasaran diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung upaya pengentasan kemiskinan. (Zein et al. 2025)

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Variabel X3)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang mengukur kualitas pembangunan manusia melalui dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Peningkatan IPM mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik sehingga berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan. (Jimea et al. 2025)

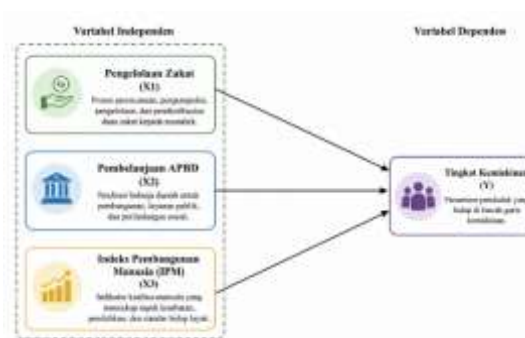
4. Pengentasan Kemiskinan (Variabel Y)

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup. Dalam penelitian ini, kemiskinan digunakan sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh pengelolaan zakat, pembelanjaan APBD, dan IPM. (Safuridar, Suci 2017)

5. Hubungan dalam Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini menggambarkan hubungan antara pengelolaan zakat (X1), pembelanjaan APBD (X2), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X3) terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Provinsi Papua Barat. Zakat berperan sebagai instrumen redistribusi pendapatan, APBD sebagai instrumen kebijakan fiskal daerah, dan IPM sebagai indikator kualitas sumber daya manusia. Ketiga variabel tersebut diduga memengaruhi tingkat kemiskinan, sehingga peningkatan pengelolaan zakat, efektivitas pembelanjaan APBD, dan kualitas pembangunan manusia diharapkan mampu menurunkan tingkat kemiskinan.

6. Bentuk Sederhana Kerangka Konseptual



Gambar 5.1 (Visualisasi kerangka konseptual penelitian: Pengaruh zakat, APBD, IPM terhadap kemiskinan.)

Visualisasi kerangka konseptual penelitian ini menjelaskan pengaruh pengelolaan zakat (X1), pembelanjaan APBD (X2), dan Indeks Pembangunan Manusia/IPM (X3) sebagai variabel bebas terhadap tingkat kemiskinan (Y) sebagai variabel terikat di Provinsi Papua Barat. Zakat berfungsi sebagai instrumen pemerataan pendapatan, APBD sebagai kebijakan fiskal untuk pembangunan dan layanan publik, sedangkan IPM merupakan cerminan kualitas sumber daya manusia yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan taraf hidup. Ketiga variabel tersebut diduga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, baik secara terpisah maupun bersama-sama.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh pengelolaan zakat dan realisasi APBD terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat periode 2020–2024. Sebagaimana diungkapkan oleh Sugiyono (2013), pendekatan ini dipilih karena berlandaskan data numerik dan analisis statistik guna menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Melalui pengolahan data tersebut, penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai hubungan nyata antara pengelolaan zakat, belanja daerah, dan tingkat kemiskinan di wilayah studi. (Sugiyono 2013)

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari:

1. Badan Pusat Statistik (BPS);
2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS);
3. Laporan realisasi APBD Provinsi Papua Barat;
4. Buku referensi metodologi penelitian;
5. Berbagai literatur pendukung berupa jurnal dan artikel ilmiah.

Data yang dianalisis merupakan data deret waktu (*time series*) tahunan selama periode 2020–2024, yang mencakup data pengelolaan zakat, pembelanjaan APBD, serta tingkat kemiskinan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data terkait zakat, pembelanjaan APBD, dan tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat. Sampel yang digunakan adalah data tahunan periode 2020–2024, sehingga teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh, yaitu seluruh populasi dijadikan sampel penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan informasi dari laporan resmi, publikasi statistik, dan dokumen instansi terkait. Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiyono (2013), yang menjelaskan bahwa data penelitian dapat diperoleh dari sumber sekunder berupa arsip dan dokumen resmi yang tersedia.

5. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel independen dan variabel dependen yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel Independen (X)

1.1 Pengelolaan Zakat (X1)

Pengelolaan zakat merupakan aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana zakat oleh lembaga resmi. Variabel ini diukur menggunakan:

- Total dana zakat yang dihimpun (rupiah)
- Total dana zakat yang disalurkan (rupiah)

1.2 Pembelanjaan APBD (X2)

Pembelanjaan APBD merupakan seluruh pengeluaran pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Variabel ini diukur menggunakan:

- Total realisasi belanja daerah (rupiah)

1.3 Indeks Pembangunan (X3)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia berdasarkan aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Variabel ini diukur menggunakan:

- Nilai IPM Provinsi Papua Barat (indeks)

2. Variabel Dependen (Y)

2.1 Tingkat Kemiskinan (Y)

Tingkat kemiskinan merupakan persentase penduduk miskin terhadap total penduduk di Provinsi Papua Barat (%), yang diperoleh dari data Badan Pusat Statistik.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hal ini sesuai dengan konsep Sugiyono bahwa dalam penelitian kuantitatif, analisis data dilakukan dengan statistik untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis.

Model persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

- **Y** = Tingkat kemiskinan
- **X₁** = Pengelolaan zakat
- **X₂** = Pembelanjaan APBD
- **X₃** = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- **α (alpha)** = Konstanta
- **β₁ dan β₂** = Koefisien regresi
- **ε (epsilon)** = Error term (kesalahan pengganggu)

7. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan:

1. **Uji t (parsial)**
Digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap tingkat kemiskinan.
2. **Uji F (simultan)**
Digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan.
3. **Koefisien Determinasi (R²)**
Digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

8. Uji Asumsi Klasik

Untuk memastikan model regresi yang digunakan memenuhi kriteria BLUE (Best Linear Unbiased Estimator), dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi:

- Uji normalitas
- Uji multikolinearitas
- Uji heteroskedastisitas

HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan laporan realisasi APBD Provinsi Papua Barat periode 2020–2024. Variabel yang diteliti meliputi pengelolaan zakat (X_1), pembelanjaan APBD (X_2), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X_3), dan tingkat kemiskinan (Y). Pengelolaan zakat diukur melalui jumlah dana zakat yang dihimpun dan disalurkan, pembelanjaan APBD diukur berdasarkan total realisasi belanja daerah, IPM diukur menggunakan nilai IPM Papua Barat, sedangkan tingkat kemiskinan diukur berdasarkan persentase penduduk miskin. Data yang digunakan merupakan data tahunan selama periode 2020–2024 dan dianalisis untuk mengetahui pengaruh pengelolaan zakat, pembelanjaan APBD, dan IPM terhadap tingkat kemiskinan di Papua Barat.

2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software EViews, diperoleh hasil estimasi regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh pengelolaan zakat, pembelanjaan APBD, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Papua Barat selama periode 2020–2024. Persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = -478,3877 - 5,06E-10X_1 - 0,000721X_2 + 7,585217X_3 + e$$

Variabel	Koefisien	Probabilitas
Konstanta (C)	-478,3877	0,1075

Variabel	Koefisien	Probabilitas
X1 (Pengelolaan Zakat)	-5,06E-10	0,0977
X2 (Pembelanjaan APBD)	-0,000721	0,3163
X ₃ (IPM)	7,585217	0,1031

Tabel 7.1 (Tabel Hasil Regresi Linear Berganda)

Berdasarkan hasil regresi, diperoleh nilai konstanta sebesar -478,3877 yang menunjukkan bahwa apabila variabel pengelolaan zakat, pembelanjaan APBD, dan IPM dianggap konstan, maka tingkat kemiskinan diperkirakan sebesar -478,3877. Koefisien pengelolaan zakat sebesar -5,06E-10 dan pembelanjaan APBD sebesar -0,000721 menunjukkan hubungan negatif terhadap tingkat kemiskinan, sehingga peningkatan kedua variabel tersebut cenderung diikuti oleh penurunan kemiskinan. Sementara itu, variabel IPM memiliki koefisien positif sebesar 7,585217 yang mengindikasikan adanya hubungan positif dengan tingkat kemiskinan. Namun, arah hubungan tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut melalui pengujian signifikansi statistik.

3. Uji Asumsi Klasik

- Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang kuat antar variabel independen dalam model regresi.

Variabel	X1	X2	X3
X1	1,000000	-0,725090	0,987814
X2	-0,725090	1,000000	-0,328447
X3	0,987814	-0,328447	1,000000

Tabel 7.2 (Tabel Hasil Uji Korelasi Antar Variabel)

Berdasarkan matriks korelasi, nilai korelasi antara X₁ dan X₃ sebesar 0,987814 atau lebih besar dari 0,80. Hal ini mengindikasikan adanya gejala multikolinearitas dalam model.

Hasil tersebut diperkuat oleh uji Variance Inflation Factor (VIF):

Variabel	Centered VIF
X1	11,68128
X2	1,507407
X3	10,18631

Karena nilai VIF variabel X₁ dan X₃ lebih besar dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi mengalami gejala multikolinearitas.

- Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan menggunakan metode Breusch-Pagan-Godfrey.

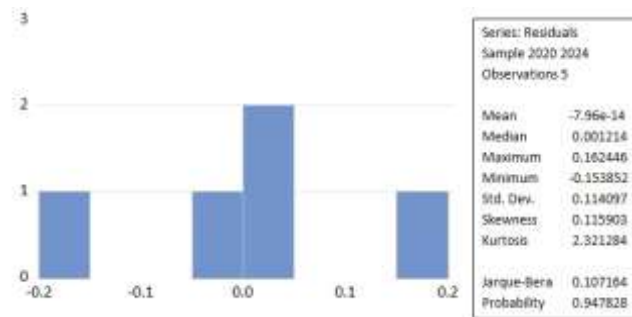
Indikator	Probabilitas
Prob. F(3,1)	0,1282
Prob. Chi-Square	0,1756

Tabel 7.3 (Tabel Hasil Uji Heteroskedastisitas)

Berdasarkan hasil pengujian, nilai Prob. Chi-Square sebesar 0,1756 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas sehingga memenuhi asumsi homoskedastisitas.

- Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi berdistribusi normal. Pengujian ini menggunakan metode Jarque-Bera dengan bantuan program EViews.



Gambar 7.1 (Visualisasi Hasil Uji Normalitas Dengan Diagram Batang)

Berdasarkan hasil uji normalitas Jarque-Bera pada EViews, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,889950. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka residual model regresi berdistribusi normal sehingga memenuhi asumsi normalitas.

4. Pengujian Hipotesis

- Uji t (Pengujian Secara Parsial)

1. Pengaruh Pengelolaan Zakat terhadap Tingkat Kemiskinan

Variabel pengelolaan zakat memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0977. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga H_1 ditolak. Dengan demikian, pengelolaan zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Papua Barat.

2. Pengaruh Pembelanjaan APBD terhadap Tingkat Kemiskinan

Variabel pembelanjaan APBD memiliki nilai probabilitas sebesar 0,3163. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka H_2 ditolak. Artinya, pembelanjaan APBD tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Papua Barat.

3. Pengaruh IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan

Variabel IPM memiliki nilai probabilitas sebesar 0,1031. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka H_3 ditolak. Dengan demikian, IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Papua Barat.

- Uji F (Pengujian Secara Simultan)

Hasil uji F menunjukkan nilai F-statistic sebesar 20,82884 dengan nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,159377. Karena nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka secara simultan pengelolaan zakat, pembelanjaan APBD, dan IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Papua Barat.

- Koefisien Determinasi (R²)

Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,984249 atau 98,42%. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 98,42% variasi tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel pengelolaan zakat, pembelanjaan APBD, dan IPM. Sementara sisanya sebesar 1,58% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pengelolaan Zakat terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Papua Barat. Meskipun koefisien regresi menunjukkan arah negatif, hasil uji statistik mengindikasikan bahwa peningkatan pengelolaan zakat belum mampu memberikan dampak yang nyata terhadap penurunan kemiskinan selama periode penelitian. Kondisi ini diduga disebabkan oleh masih terbatasnya penghimpunan dana zakat, rendahnya cakupan penerima manfaat, serta belum optimalnya pemanfaatan zakat produktif untuk pemberdayaan

ekonomi masyarakat. Selain itu, jumlah observasi yang terbatas dan karakteristik masyarakat Papua Barat yang mayoritas non-Muslim juga dapat memengaruhi efektivitas zakat dalam menekan angka kemiskinan.

2. Pengaruh Pembelanjaan APBD terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelanjaan APBD tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Papua Barat. Meskipun koefisien regresi menunjukkan hubungan negatif, peningkatan realisasi belanja daerah belum mampu menurunkan kemiskinan secara signifikan. Hal ini dapat disebabkan oleh alokasi anggaran yang belum sepenuhnya difokuskan pada program yang secara langsung menyentuh masyarakat miskin, serta adanya ketimpangan pembangunan dan keterbatasan akses wilayah di Papua Barat. Dengan demikian, besarnya anggaran yang dibelanjakan belum tentu menghasilkan dampak yang optimal apabila tidak diiringi dengan efektivitas pelaksanaan program dan ketepatan sasaran.

3. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Papua Barat. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia yang tercermin melalui aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak belum secara langsung mampu menurunkan tingkat kemiskinan selama periode penelitian. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh masih adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah, khususnya di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, dampak peningkatan IPM terhadap pengurangan kemiskinan umumnya bersifat jangka panjang sehingga belum terlihat secara signifikan dalam periode penelitian yang relatif singkat.

4. Pengaruh Pengelolaan Zakat dan Pembelanjaan APBD terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil uji simultan, pengelolaan zakat, pembelanjaan APBD, dan IPM secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Papua Barat. Hasil ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut belum mampu menjelaskan perubahan tingkat kemiskinan secara signifikan selama periode 2020–2024.

Secara teoritis, zakat, APBD, dan IPM merupakan faktor yang memiliki keterkaitan dengan pengurangan kemiskinan. Namun dalam praktiknya, tingkat kemiskinan di Papua Barat juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, kondisi geografis, pemerataan pembangunan, serta keterbatasan infrastruktur dasar. Selain itu, jumlah observasi yang relatif sedikit dan adanya indikasi multikolinearitas antara variabel independen turut memengaruhi hasil penelitian sehingga hubungan yang terbentuk belum menunjukkan signifikansi statistik.

Tidak signifikannya pengaruh pengelolaan zakat, pembelanjaan APBD, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan diduga disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, penelitian ini hanya menggunakan data selama periode 2020–2024 sehingga jumlah observasi yang digunakan relatif terbatas. Jumlah data yang sedikit dapat memengaruhi kemampuan model dalam mendeteksi hubungan statistik secara lebih akurat. Kedua, terdapat indikasi multikolinearitas antara variabel pengelolaan zakat dan IPM yang ditunjukkan oleh nilai korelasi sebesar 0,987814 serta nilai VIF yang melebihi batas ideal. Kondisi ini menyebabkan model regresi mengalami kesulitan dalam membedakan pengaruh masing-masing variabel terhadap tingkat kemiskinan. Selain itu, dampak dari zakat, pembelanjaan APBD, maupun peningkatan IPM pada umumnya bersifat jangka panjang, sehingga pengaruhnya terhadap penurunan kemiskinan belum dapat terlihat secara optimal dalam periode penelitian yang relatif singkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat selama periode 2020–2024 masih tergolong tinggi dan menunjukkan pola yang fluktuatif. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia yang belum merata, serta akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi yang masih terbatas. Selama periode penelitian, pengelolaan zakat, realisasi pembelanjaan APBD, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengelolaan zakat, pembelanjaan APBD, dan IPM secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Papua Barat. Selain itu, pengujian simultan juga menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa perubahan tingkat kemiskinan di Papua Barat tidak hanya dipengaruhi oleh ketiga variabel tersebut, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, kondisi geografis, serta efektivitas kebijakan pembangunan daerah.

Meskipun demikian, zakat, APBD, dan IPM tetap memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih optimal antara pemerintah daerah dan lembaga

pengelola zakat, disertai peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan pengelolaan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan, upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Papua Barat diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik pada masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrin, Yunus & Aziz &. 2024. "Jurnal Ekonomi Pembangunan Unkhair Vol 15, No. 1. | 1" 15 (1): 1–23.
- Ana, Putri. 2022. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI INDEKS" 8 (1): 188–201.
- Azizah, Nur, Khairul Amri, and M Haris Riyaldi. 2023. "Peran Belanja Pemerintah Daerah Dalam Memoderasi Pengaruh Zakat Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh" 2 (2): 80–89.
- Chaerunnisa, Reggina, Nur Azizah Muchlis, and Wahyu Nur Eliza. 2025. "Zakat Dalam Islam : Pengertian , Hukum , Jenis , Syarat , Dan Ketentuan Lengkap," 233–42.
- Daulay, R. J., Khoiri N., Syahputera A. 2022. "يَوْمَ لَا يَمْلِكُ لَكَ وَبِيَوْمَ يُبَيِّنُ لَكَ مَوَاسِدَ رَحْمَتِي يَا أَسْلَمُ لَقَدْ لَقِيَكَ الْفُؤَادُ الْأَبْيَضُ" ZAKAT PRODUKTIF (Tinjauan Hukum Islam Dalam Karya Prof. DR. Yusuf Al-Qardawi) *Jaka* 10:1001–16. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>.
- Imran, J. etc. 2025. "Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf The Role of Zakat and Wakaf in Reducing Economic Risks in Jayapura." *The Role Of Zakat and Wakaf In Reducing Economic Risk In Jayapura* 6 (1): 37–45.
- Jimea, Mea, Mike Apriyanti, and Lela Rospida. 2025. "DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA 2014-2023 JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , Dan Akuntansi)" 8 (2): 439–55.
- Kasman. 2017. "Pelaksanaan Dan Pertanggung Jawaban APBD Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah By: Fajriatul Mukarramah Kasman □." *Pelaksanaan Dan Pertanggung Jawaban APBD Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah* 6 (2).
- Kende, Tutun Arjuna. 2024. "Efektivitas Dan Efisiensi Belanja Daerah Untuk Pembangunan Manusia Dan Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Papua" 9:221–46.
- Kuntadi, Cris, and Dian Rosdiana. 2022. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan : Perencanaan Anggaran , Peraturan , Koordinasi (Literature Review)" 4 (2): 142–52.
- Maulani, Rusdarti &. 2023. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Dan Belanja Publik Terhadap Kemiskinan Dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sebagai Variabel Moderasi Di Jawa Tengah" 3 (2): 65–74.
- Pane, Anggi Luthfiah, Nurlaila Rachman, Triana Triana, Perbankan Syariah, Universitas Islam, and Negeri Sumatera. 2025. "Keadilan Distributif Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Implikasi Filosofis Dan Praktis" 2 (Sugiarto 2015).
- Parinusa, Sisilia Maria, and Danny E Waimbo. 2020. "Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat Tahun 2009 - 2019" 11 (November): 96–112.
- Risdiyanto, Endro, Julius Ary Mollet, and Halomoan Hutajulu. 2023. "Analisis Kemandirian Fiskal Dan Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Papua" 11 (2): 1813–22.
- Safuridar, Suci, D. N. 2017. "Analisis Dampak Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Kehidupan Masyarakat Miskin Di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur" 8 (2): 149–59.
- Salim, Agus, Rifki Khoirudin, and Ahmad Dahlan. 2025. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Papua Dan Papua Barat" 2 (January): 399–406.
- Setianda, Rizky Aldi, Try Edi Suwarno, M Riduan Abdillah, Yasir Hadiani, Victorinus Laoli, Faisal Fadly Pulungan, Riyadatul Muthmainah, et al. 2025. "Menata APBD , Membangun Daerah : Menuju Kemandirian Fiskal Melalui Efisiensi Anggaran Serta Investasi Infrastruktur Pada Kabupaten Tanah Laut" 5:48–54. <https://doi.org/10.47709/jap.v5n1.6215>.
- Siahaan, Theodorus William, and Universitas Sriwijaya. 2014. "Pengaruh Modal Manusia Terhadap Upah Pekerja Pada Sektor Jasa Montir Motor Di Palembang" 8 (2): 20.

Sugiyono, Prof. Dr. 2013. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF DAN ReD*.

Syaifudin, Rizal, Muhammad Salman Alfarisi, Gabriella Stephanie, Regina Putri, Abdul Jabbar, Adli Malik, and Farah Naili Zulfah. 2024. "Determinan Ketimpangan Wilayah Di Indonesia Tahun 2012 – 2022: Pendekatan Analisis Panel Dinamis" 5 (2). <https://doi.org/10.47065/jbe.v5i2.5143>.

Utami, Barti, Adang Sunarko, and Ida Wati. 2024. "Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan : Perspektif Hukum Ekonomi Islam" 3 (2): 73–78.

Zein, Ahmad Wahyudi, Muhammad Riski, Allya Zahra, and Putri Nasution. 2025. "Efisiensi Penggunaan Anggaran Publik Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial" 2:118.